

**PENGARUH SIKAP DAN MOTIVASI MASYARAKAT TERHADAP  
PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh : Nurul Amin**

*Pendahuluan*

*Abstract*

*Di dalam ketentuan perpajakan maka pajak merupakan pendapatan yang dibagi atas dua yaitu pajak yang merupakan pendapatan negara dan pajak yang merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memiliki pendapatan daerah dengan dasar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan PBB di dalam kerangka teori menyatakan bahwa pertama teori yang mendasar, kedua teori partisipasi, ketiga partisipasi masyarakat (Y), keempat sikap (X1), kelima Motivasi (X2), kesemuanya ini merupakan kerangka teori pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.*

*Metodologi yang dipakai adalah tipe penelitian, populasi sampel, tehnik pengambilan sampel, tehnik analisis data serta skala pengukuran.*

*Dalam jurnal ini dinyatakan dengan kesimpulan bahwa variabel partisipasi (Y) dinyatakan baik, variabel sikap (X1) menyatakan bahwa sikap masyarakat kurang mendukung, variabel motivasi (X2) menyatakan motivasi kurang tinggi.*

*Saran dalam jurnal ini menyatakan bahwa pemungutan PBB harus dapat disesuaikan dengan keadaan dilapangan, pemberitahuan dari petugas tentang sanksi, penyampaian informasi melalui ketua RT dan lurah serta kepala desa, sanksi bagi keterlambatan pembayaran, adanya pelatihan bagi petugas pemungut PBB dan petugas turun langsung kepada masyarakat.*

## **I. LATAR BELAKANG**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini terjadi antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan (Kartasasmita, 1997:56)

Berdasarkan studi empiris di atas, di mana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin pembangunan:

1. Harus menguntungkan rakyat

2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud secara jujur, terbuka dan dipertanggungjawabkan (Kartasmita, 1997 :56-57)

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparaturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut.

Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti.

Pajak mempunyai 2 fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi.

Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada 2 tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak (Mugrave dan Musgrave,1984). Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan ke dua adalah prinsip manfaat.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang. maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.

Pemkab Bengkalis dalam mengoptimalkan penarikan PBB telah melakukan beberapa langkah yaitu dengan mengadakan operasi tuntas bulan Januari, penyuluhan PBB di masing-masing Kecamatan. Juga Panutan pembayaran PBB bulan Mei- Juni 2012 di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Penyebaran spanduk untuk penyampaian SPPT undian hadiah pembayaran PBB dan jatuh tempo pembayaran PBB, dan juga spanduk untuk mengingatkan warga Kabupaten Bengkalis membayar pajak. Namun, hal tersebut belum mampu memberikan peringatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Hal ini juga terjadi di beberapa kecamatan dengan penduduk yang padat seperti kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Padahal seperti yang sudah di uraikan di atas, di mana masyarakat adalah

salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu daerah, maka diharapkan juga masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar PBB.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi adalah:

1. Sikap dari masyarakat tersebut yang selalu menunda-nunda kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan belum/tidak sadarnya akan pentingnya PBB
2. Motivasi masyarakat masih kurang baik untuk ikut serta dalam pembangunan suatu daerah melalui ikut berpartisipasi dalam pembayaran PBB.

Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui masalah yang ada dan mencari alternatif jawaban-jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

Dari uraian yang ada maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

*“Apakah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dipengaruhi oleh sikap dan motivasi?”*

## **II. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### ***1 Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap dan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis

### ***2 Kegunaan Penelitian***

- a. Bagi instansi
- b. Bagi penyusun
- c. Bagi pihak lain

## **III. KERANGKA TEORI**

### ***1 Teori Yang Mendasari***

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan konsep-konsep yang berhubungan ke arah penelitian yang dapat diperoleh melalui literatur atau studi pustaka. Konsep-konsep inilah yang akan mendasari penelitian. Teori menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadjadja (1982:12) adalah :

“Ungkapan hubungan kausal yang logis antara variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu”

### ***2. Teori Partisipasi***

Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Keduanya memiliki makna yang berbeda.

Menurut pendapat Santoso Sastropetro ada 5 (lima) unsur penting yang menentukan gagalnya dan berhasilnya partisipasi, yaitu :

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan
4. Enthousiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
5. Adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. (Santoso Sastropetro, 1988 : 41)

Santoso Sastropoetro menjelaskan bahwa ada 5 (lima) hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, pendidikan sosial dan percaya pada diri sendiri
2. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
3. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara
4. Kesediannya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan
5. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan (Santoso Sastropoetro, 1988:22)

### 3. *Partisipasi Masyarakat (Y)*

Sasaran terakhir dari pelaksanaan pembangunan adalah tercapainya tujuan pembangunan yang diikuti dengan tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap program pembangunan. Semua pembangunan ditujukan untuk masyarakat dengan maksud untuk membangun masyarakat agar mempunyai kekuatan sendiri. Salah satu komponen pembangunan erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Jadi, bisa dikatakan pembangunan erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat.

Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat tidak akan pernah lepas dari pembangunan. Sehingga masyarakat mempunyai hak dan dapat berperan aktif dalam mensukseskan kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah sehingga tujuan pembangunan itu dapat tercapai. Siagian mengungkapkan hal yang sama yaitu "Partisipasi dari masyarakat harus mutlak diperlukan. Oleh karena itu mereka-mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan" (*Khairuddin : 125*). Dari pengertian yang dikemukakan oleh Siagian di atas, di mana masyarakat itu adalah objek dari pembangunan dan sekaligus menjadi subjek pembangunan. Maka pembangunan itu memerlukan partisipasi dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak akan tercapai atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Oleh karena itu masyarakat sangatlah penting dalam proses pembangunan.

Korten melalui Kesesuaian (*The fit model*) mengemukakan tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pembangunan, yaitu :

1. Faktor pertama, yaitu program itu sendiri. Program yang ideal ditandai dengan perhatian terhadap kebutuhan penerima program sehingga program merupakan hasil dari tuntutan kebutuhannya dan kemanfaatannya dapat dirasakan. Isi program harus berkualitas, benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan yang dilakukan penerima program.
2. Faktor kedua, yaitu penerima program. Penerima program harus memiliki sarana pengungkapan kebutuhan agar menjadi beban bagi organisasi pelaksana dalam proses pengambilan keputusan organisasi sehingga akhirnya akan ditandai dengan adanya kesesuaian hasil program dengan kebutuhan penerima program.
3. Faktor ketiga yaitu organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan khusus sesuai dengan persyaratan tugas dari program dan mempertimbangkan kebutuhan penerima program dalam proses keputusan organisasi (*Korten dan Syahrir, 1988 : 240-242*).

#### 4. **SIKAP (X<sub>1</sub>)**

Indrawijaya mendefinisikan sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Indrawijaya 2000:40). Menurut Robbin, sikap adalah “Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu”(Stephen P. Robbins 1999:169). Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon”(Azwar , 1998 :3).

George C. Edward III (1991:30) bahwa :”sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.”

#### 5. **Motivasi (X<sub>2</sub>)**

Motivasi berasal dari kata latin “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Drs. Malayu SP. Hasibuan (2003:95) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

## VI. METEDOLOGI PENELITIAN

### 1. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah merupakan tipe penelitian eksplanatori (penjelasan), karena penelitian ini akan menyoroti hubungan antar variabel dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

### 2. **Populasi dan Sampel**

#### a. **Populasi Penelitian**

Populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan unit analisis atau elemen penelitian yang akan diteliti.

#### b. **Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel penelitian ini adalah :

##### 1. **Unit analisis**

Adalah bagian terkecil dari objek yang akan diteliti.

##### 2. **Ukuran Sampel**

Sampel adalah bagian dari seluruh populasi yang diambil dengan cara tertentu sedemikian rupa sehingga bisa mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, penentuan sampel responden yaitu dengan menggunakan rumus Frank Lych (Sugiyono, 1999 : 79)

Yaitu :

$$N = \frac{NZ^2.p(1-p)}{Nd^2+Z^2.p(1-p)}$$

Jadi perhitungannya

$$N = \frac{NZ^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

$$N = \frac{15.196(1.96)^2 \cdot 0.5(1-0.5)}{15.196(0.1^2) + 1.96 \cdot 0.5(1-0.5)}$$

$$N = \frac{14594,2384}{152,45}$$

$$= 95,7 = 96 \text{ responden}$$

### 3. *Teknik pengambilan sampel*

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional cluster random sampling*.

### 4. *Teknik Analisis Data*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu analisis, yaitu secara kuantitatif. Selanjutnya untuk lebih mengetahui nilai hubungan antara variabel dengan mencari selisih prosentase dua titik ekstrim yaitu tinggi (T) dan rendah (R) digunakanlah analisis dengan menggunakan tabel epsilon.

### 5. *Skala Pengukuran*

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989 : 101-103) ada empat skala pengukuran, yaitu :

- a. Ukuran Nominal
- b. Ukuran Ordinal
- c. Ukuran Interval
- d. Ukuran Rasio

Dalam penelitian ini mengenai sikap dan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, digunakan skala ordinal, yaitu memberi nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan ini. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antar rentang skor 1 sampai dengan 4, di mana ini dimaksudkan :

- ❖ Jawaban yang sangat mendukung skor 4
- ❖ Jawaban yang mendukung skor 3
- ❖ Jawaban yang kurang mendukung skor 2
- ❖ Jawaban yang tidak mendukung skor 1

### 6. *Pengujian Hipotesis*

Analisa data ini pada dasarnya dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya, maka di dalam menganalisisnya digunakan skala ordinal. Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah :

a. Koefisien kolerasi Rank Kendall ( $\tau$ )

Rumus ini digunakan untuk menguji suatu hipotesa minor yaitu tingkat asosiasi atau hubungan antara variabel  $X_1$  dengan  $Y$  atau  $X_2$  dengan  $Y$ , adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(n-1)}$$

### Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan membahas hasil-hasil penelitian pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat sikap ( $X_1$ ) dan variabel tingkat motivasi ( $X_2$ ) dengan Partisipasi ( $Y$ ) ada korelasi positif dan sangat signifikan.

#### 1. Variabel Partisipasi ( $Y$ )

Partisipasi merupakan hasil yang dicapai pemerintah untuk pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik maka pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai sementara apabila partisipasi masyarakat kurang baik maka pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak akan dapat tercapai atau bahkan gagal. Berdasarkan hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori kurang tinggi, yaitu sebanyak 85 responden (88.6%). Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan rekapitulasi tabel variabel partisipasi kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.

#### 2. Variabel Sikap ( $X_1$ )

Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel sikap menunjukkan bahwa sikap masyarakat adalah kurang mendukung, hal ini dapat dilihat dari jawaban sebagian besar responden atau sebanyak 52 responden atau sebesar 54.2%.

#### 3. Variabel Motivasi ( $X_2$ )

Berdasarkan tabel rekapitulasi variabel motivasi menunjukkan bahwa motivasi masyarakat adalah kurang tinggi, hal ini dapat dilihat dari jawaban sebagian besar responden atau sebanyak 76 responden atau sebesar 79.2%.

### Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya berguna bagi pembaca dan instansi terkait.

1. Dalam melakukan sosialisasi PBB, hendaknya petugas PBB dapat menyesuaikan waktu yang tepat kepada masyarakat dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan demikian masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang PBB. Sehingga masyarakat dapat aktif dan berperan serta dalam mengikuti prosedur /tata cara pembayaran PBB mulai dari pendataan, pendaftaran atau perhitungan PBB, sehingga bila jumlah pajak tidak sesuai maka wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah PBB tanpa merubah ketentuan yang ada.
2. Petugas PBB hendaknya memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi PBB, bukan hanya waktu untuk melunasi PBB mereka. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat terhadap sanksi yang diberikan.
3. Petugas PBB hendaknya memberikan kepada setiap RT dan Kelurahan mengenai informasi PBB yang terbaru dan Undang-undang PBB, dapat melalui brosur dan plakat. Sehingga setiap Kelurahan dan RT dapat menempelkan pada setiap papan pengumuman yang ada, mengenai informasi PBB tersebut. Sehingga masyarakat yang menjadi wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui informasi tentang prosedur PBB dan Undang-undang

yang mengatur tentang PBB yang dapat di lihat pada setiap papan pengumuman yang ada di kelurahan mereka dan RT masing-masing. Informasi yang diberikan melalui media tersebut hendaknya bukan sebatas informasi ajakan semata, akan tetapi juga menginformasikan proses penghitungan PBB, sehingga masyarakat mengetahui system penghitungan yang ditetapkan.

4. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, apabila membayar setelah jatuh tempo hendaknya petugas memberikan sanksi langsung kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan. Sehingga masyarakat selalu berusaha membayar tepat waktu dan masyarakat yakin kalau adanya kepastian hukum tentang PBB
5. Petugas pemungut PBB hendaknya melakukan pelatihan khusus kepada petugas-petugas PBB, sehingga memiliki kemampuan yang luas tentang PBB, sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Selama ini masyarakat merasa petugas hanya menjelaskan masalah tata cara pembayaran saja.
6. Petugas PBB dapat turun langsung kepada masyarakat untuk memungut PBB, supaya jangan hanya masyarakat saja yang aktif datang ketempat-tempat pembayaran PBB yang telah disediakan. Dan juga, apabila wajib pajak sudah jatuh tempo, hendaknya petugas PBB, langsung menagih dengan mendatangi tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat tidak mengalami penumpukan tagihan Hal ini akan menumbuhkan dorongan yang baik dari masyarakat untuk tetap membayar PBBnya.
7. Dalam menerima pembayaran hendaknya petugas menjelaskan dengan baik, apakah mereka telah melanggar aturan (membayar terlambat) dan berapa persen denda yang harus dibayar. Dan hendaknya petugas juga memberikan penjelasan mengenai ketetapan biaya kenaikan PBB yang ditetapkan oleh pemerintah Sehingga wajib pajak membayar dengan ikhlas

#### **Saran bagi akademis**

- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model yang lebih baik dan dengan metode yang lebih tepat untuk melihat pengaruh sikap, motivasi terhadap partisipasi lebih akurat.
- Penelitian berikutnya juga dapat melihat variabel-variabel lain selain sikap dan motivasi, karena partisipasi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain seperti variabel sosialiasi dan kemampuan ekonomi.

#### **Daftar rujukan**

- Arep, Ishak, dkk. 2003. *Manajemen Motivasi*. Jakarta. Grasindo
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitin*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Brotowidjodo, D, Mukayat. 1991. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 1992. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. PT. Bina Rena Pariwisata
- Edward, C, George. 2003. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta. LP3ES
- Faturrochman. 2006. *Pengantar Psikologi Sosial*. Pustaka. Jakarta
- Gerungan, W. A. 1988. *Psycology social*. Bandung. Eresco
- Gibson, Ivancevich, Donely. 1990. *Organisasi dan Manajemen :Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta. Erlangga
- Hasibuan, H. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Indrawijaya, Adam. 2003. *Perilaku Organisasi*. Bandung. Pustaka Sinar Baru



- Kartasamita, Ginanjar. 1992. *Administrasi Pembangunan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. LP3ES
- Khairuddin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta. Liberty
- Korten, David C dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Mar'at. 1984. Sikap manusia. *Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Markus, Muda, Drs. 2005. *Perpajakan Indonesia "Suatu Pengantar"*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Meier & Brudney. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Nurmantu, Safri Drs. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Kelompok Yayasan Obor Indonesia
- Robbinson, Stephen. P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, kontroversi, aplikasi*. Jakarta. Prenhallindo
- Sastropetro, Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Penerbit Alumni
- Sedarmayanti. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung. Humaniora
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta. LP3ES
- Soemitro, Rochmat. H. 1986. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Eresco
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar, metode dan teknik*. Yogyakarta. Media Presindo
- Suigiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung
- Tannembaum, R, dkk. 1992. *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*. Semarang. Dahara Prize
- Tjokroamidjojo, H, Bintoro. 1982. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta. Alhpa Logic Business
- Umar, Husain. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia